

BUKU SAKU KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020



STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan dasar kesehatan.



Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

1.

SPM KESEHATAN DAERAH PROVINSI



2.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Buku Saku Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Buku Saku Kinerja (SPM-BK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan resume capaian kinerja penyelenggaraan SPM-BK di Jawa Tengah per 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Saku Kinerja SPM-BK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Semoga upaya kita bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah mendapatkan rahmat dan ridhoNya.

Surabaya, Juni 2021



DAFTAR ISI

3 KATA PENGANTAR

4 DAFTAR ISI

5 DASAR HUKUM

11 SPM-BK DAERAH PROVINSI

20 SPM-BK DAERAH KABUPATEN/KOTA

58 DEFINISI OPERASIONAL SPM-BK PROVINSI

60 DEFINISI OPERASIONAL SPM-BK KAB/KOTA

64 SUMBER DATA

65 TIM PENYUSUN

DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL



DASAR HUKUM



UU No. 23 TAHUN 2014

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, **kesehatan**, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial
- Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1

Merupakan **kebutuhan dasar bagi setiap individu** secara universal

2

Pemenuhan **kebutuhan dasar** dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah

3

Merupakan **pelayanan dasar** yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota

5

Merupakan **kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota** untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya

6

Berlaku secara nasional

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
- Jenis SPM : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Sosial
- Materi muatan SPM : Jenis pelayanan dasar, Mutu pelayanan dasar, Penerima pelayanan dasar
- Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar
- SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM daerah kabupaten/kota

Permenkes No. 4 Tahun 2019

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan.
- Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan, dan tata cara pemenuhan standar



STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI



PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN SPM-BK TAHUN 2020

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”

MISI Ke-4	TUJUAN	SASARAN	PROG. PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	
					SATUAN	TARGET
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Surveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB dan Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	%	100
				Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	%	100

INTEGRASI SPM-BK KE DALAM ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

PRIORITAS PROVINSI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana	Percentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Penyiapan informasi terkait inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi; Penyiapan sumber daya kesehatan, Koordinasi dan monitoring program; Penanggulangan KLB/bencana dan krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi); Outbreak respon; Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana; Penanganan paska KLB/bencana dan krisis kesehatan
	Percentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana < 24 jam	Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	

RENCANA TARGET PENCAPAIAN SPM-BK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2020
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	111.541 Orang	111.541 Orang	100%	Rp. 6.867.295.000,-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	152.961 Orang	152.961 Orang	100%	

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN SPM-BK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	PROGRAM ANGGARAN	JUMLAH
1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1.159.675.000
2	Sumber Daya Kesehatan	3.793.302.000
3	Pelayanan Kesehatan	1.914.318.000
	Jumlah total	6.867.295.000

REALISASI CAPAIAN SPM-BK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN SPM		REALISASI CAPAIAN = (4:6X100%)
			JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	RAPBD 2020	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	111.541 Orang	Rp. 6.867.295.000,-	111.541 Orang	Rp. 5.439.072.113,-	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	152.961 Orang		152.961 Orang		100%

PERMASALAHAN

- Kesulitan dalam penentuan sasaran pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- Frekuensi dan intensitas kejadian bencana dan KLB merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan menggunakan prediksi
- Belum ada data sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, dan anggaran

Upaya Pemecahan Masalah

- Penghitungan sasaran menggunakan data pemetaan wilayah risiko bencana bersumber dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPS.
- Data sasaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Penghitungan capaian akhir menggunakan data riil.
- Penguatan manajemen bencana di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

SPM KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA

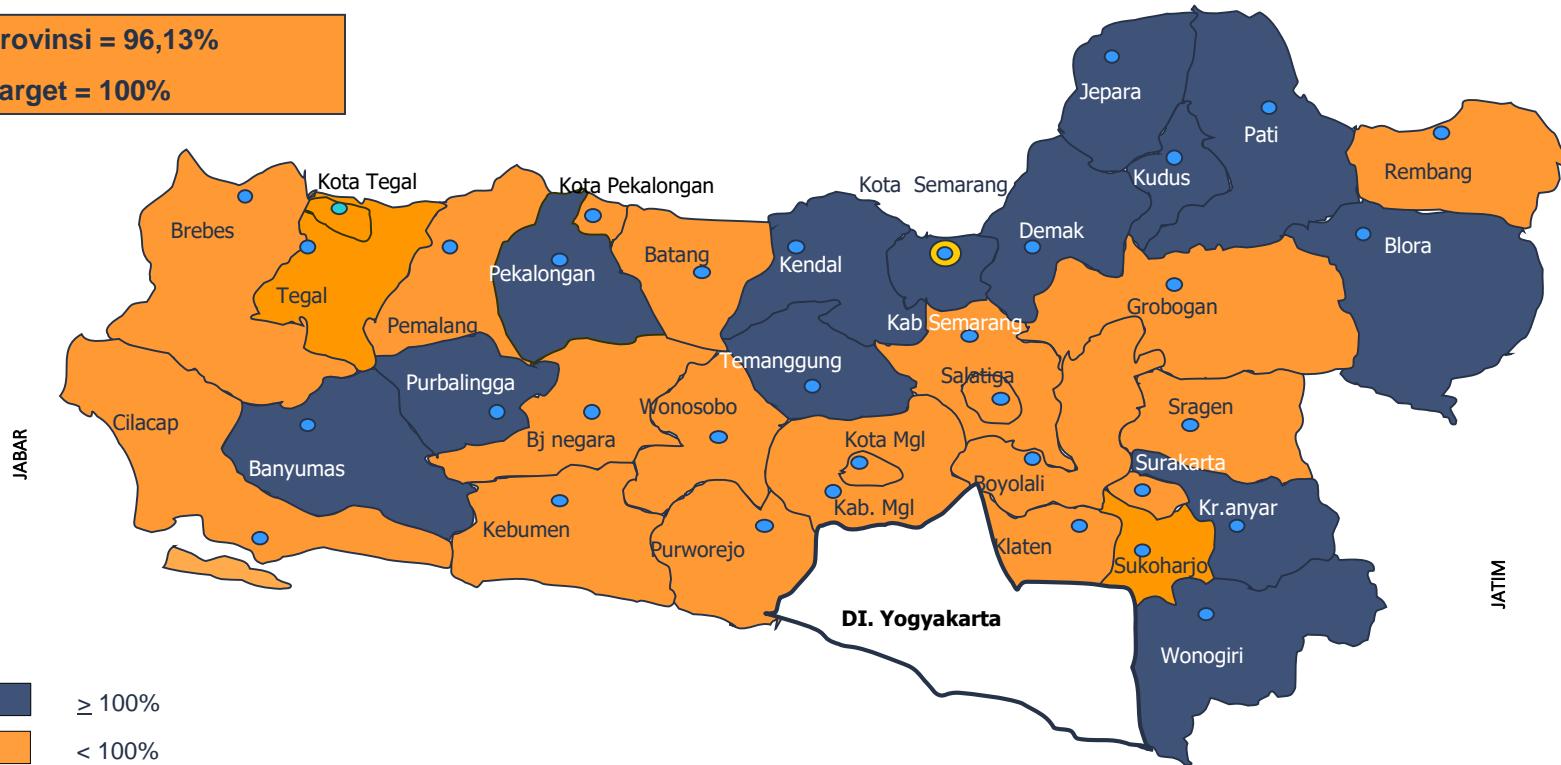




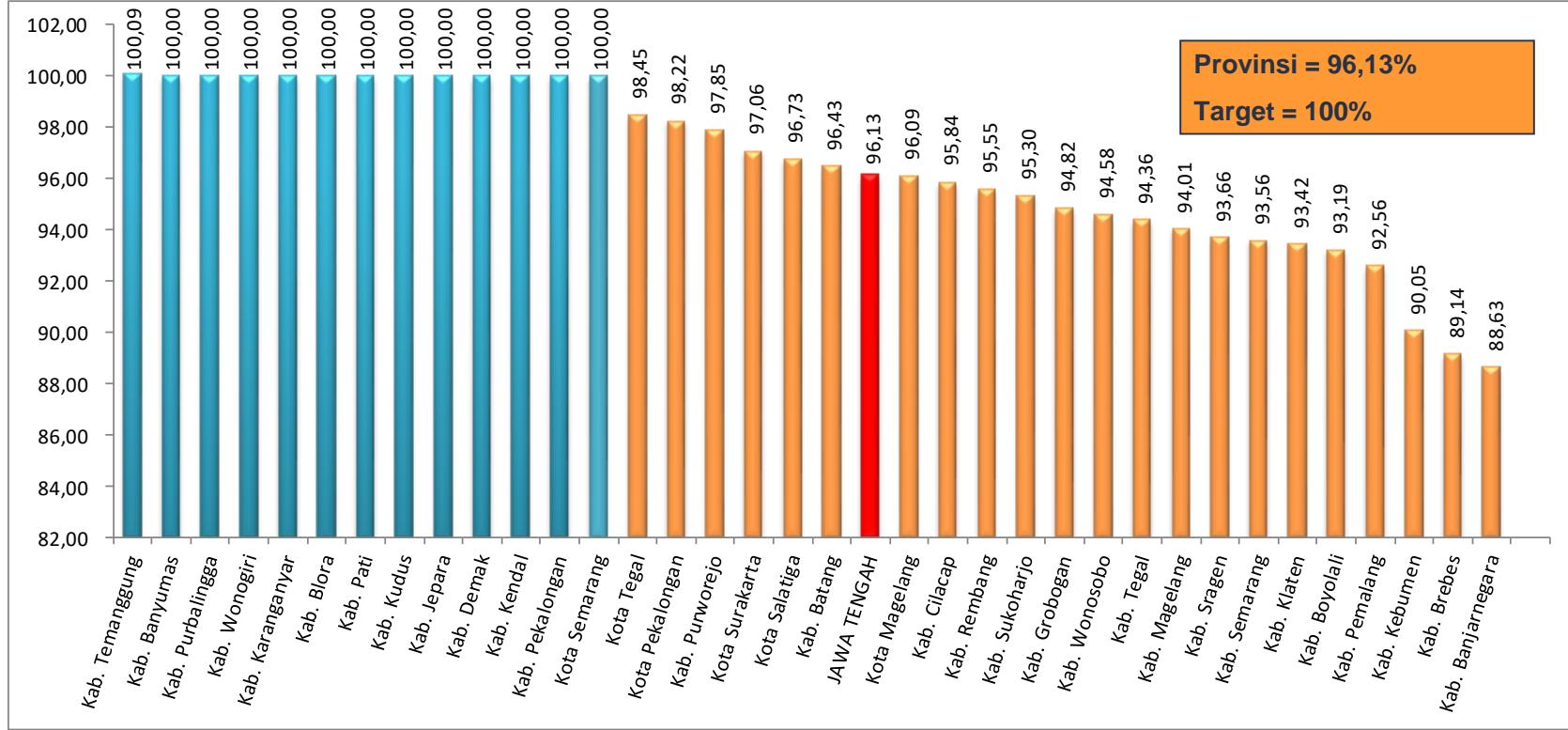
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Provinsi = 96,13%
Target = 100%



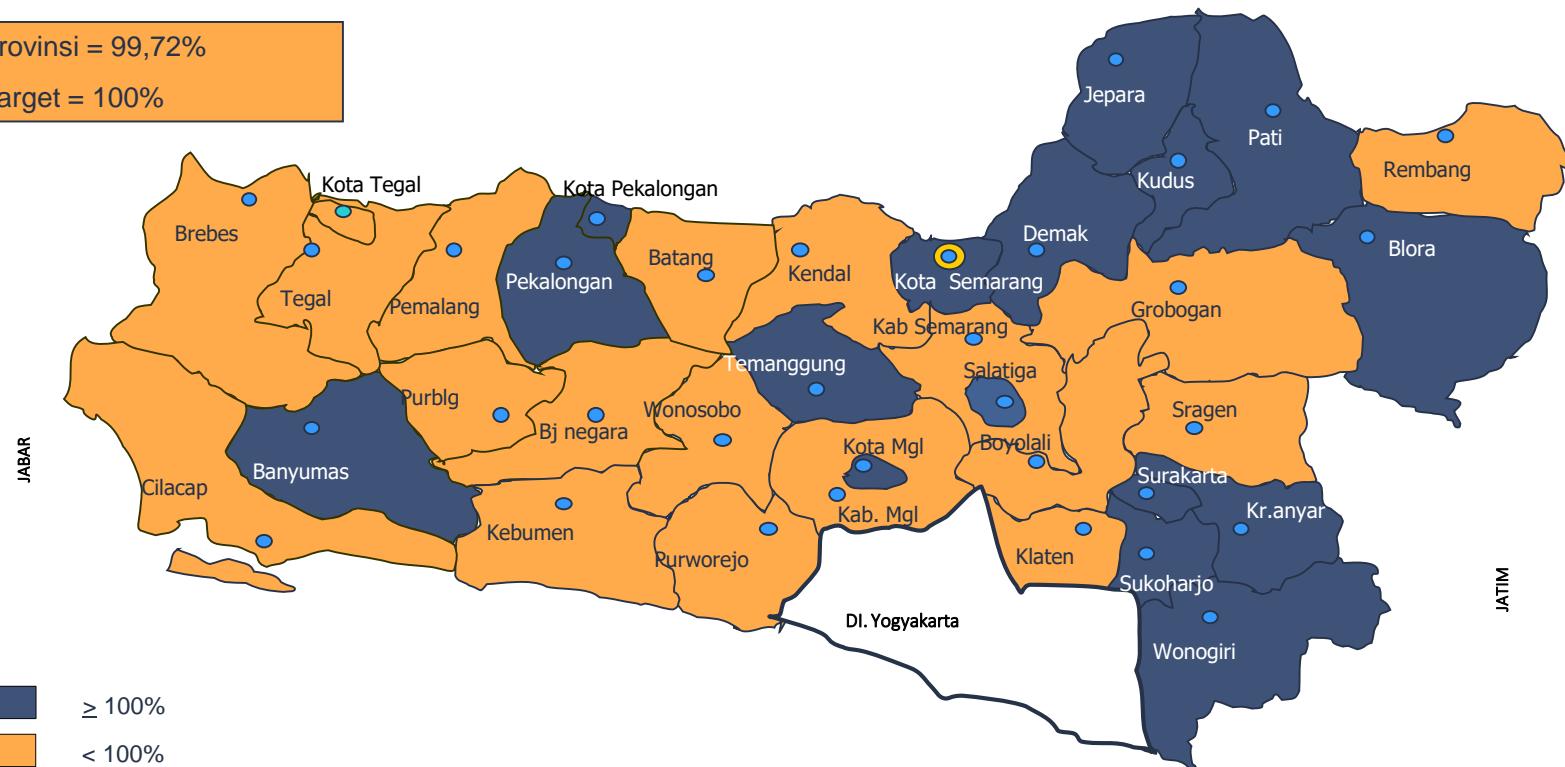
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL



PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

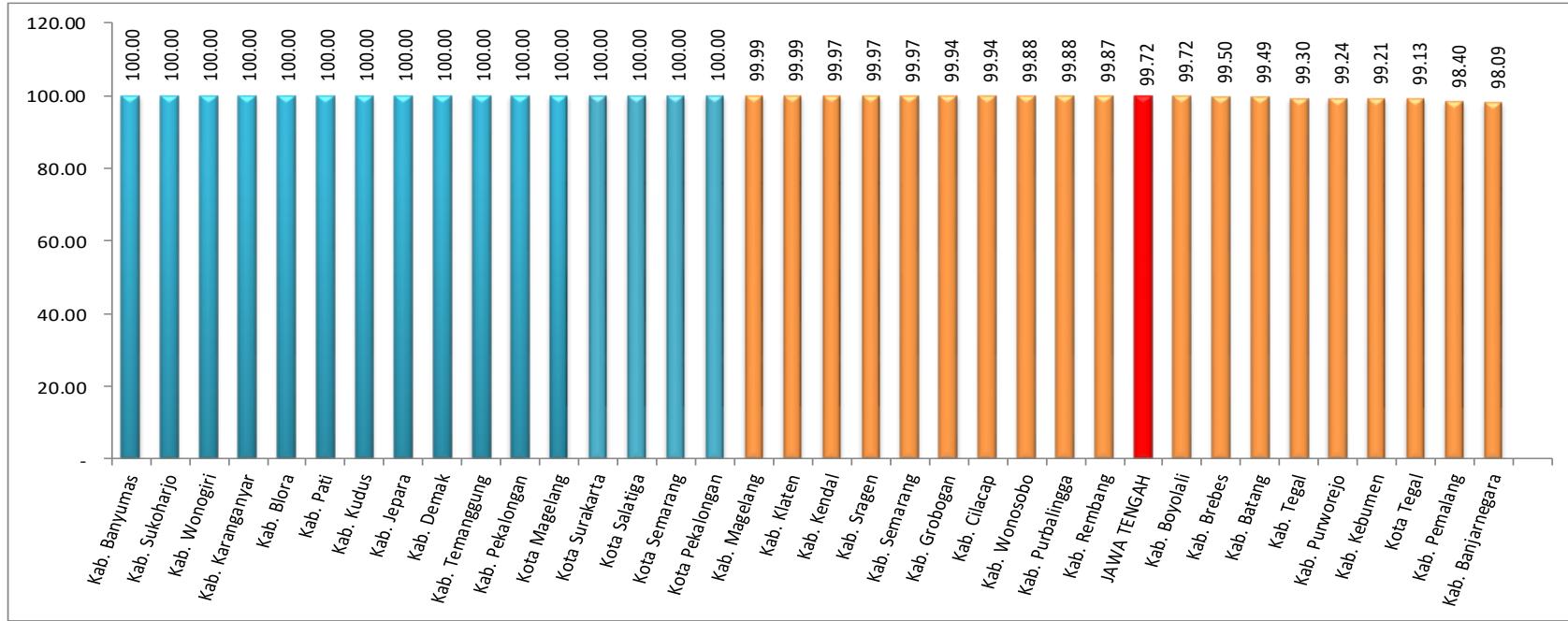
Provinsi = 99,72%

Target = 100%



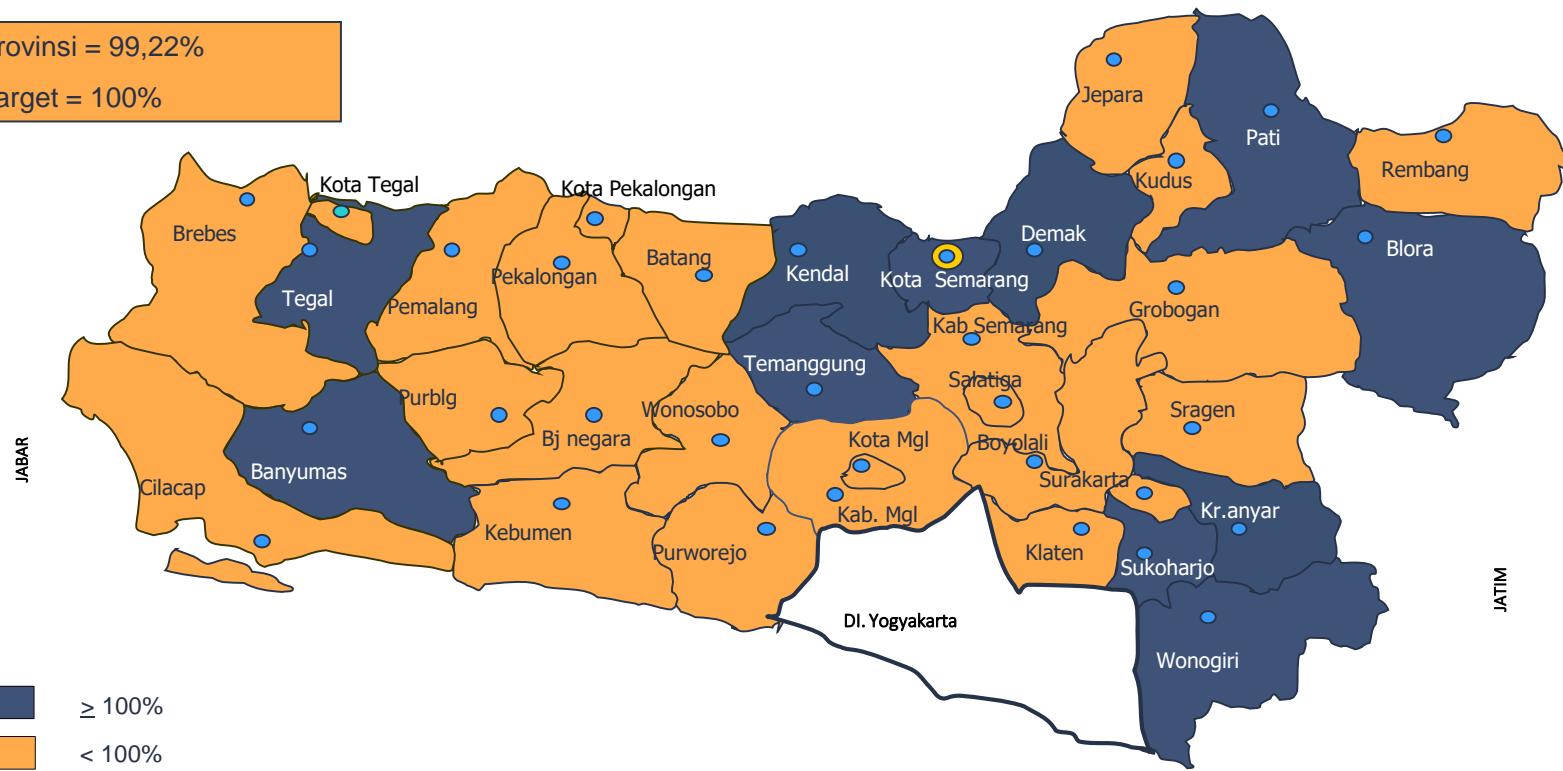
PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

Provinsi = 99,72%
Target = 100%

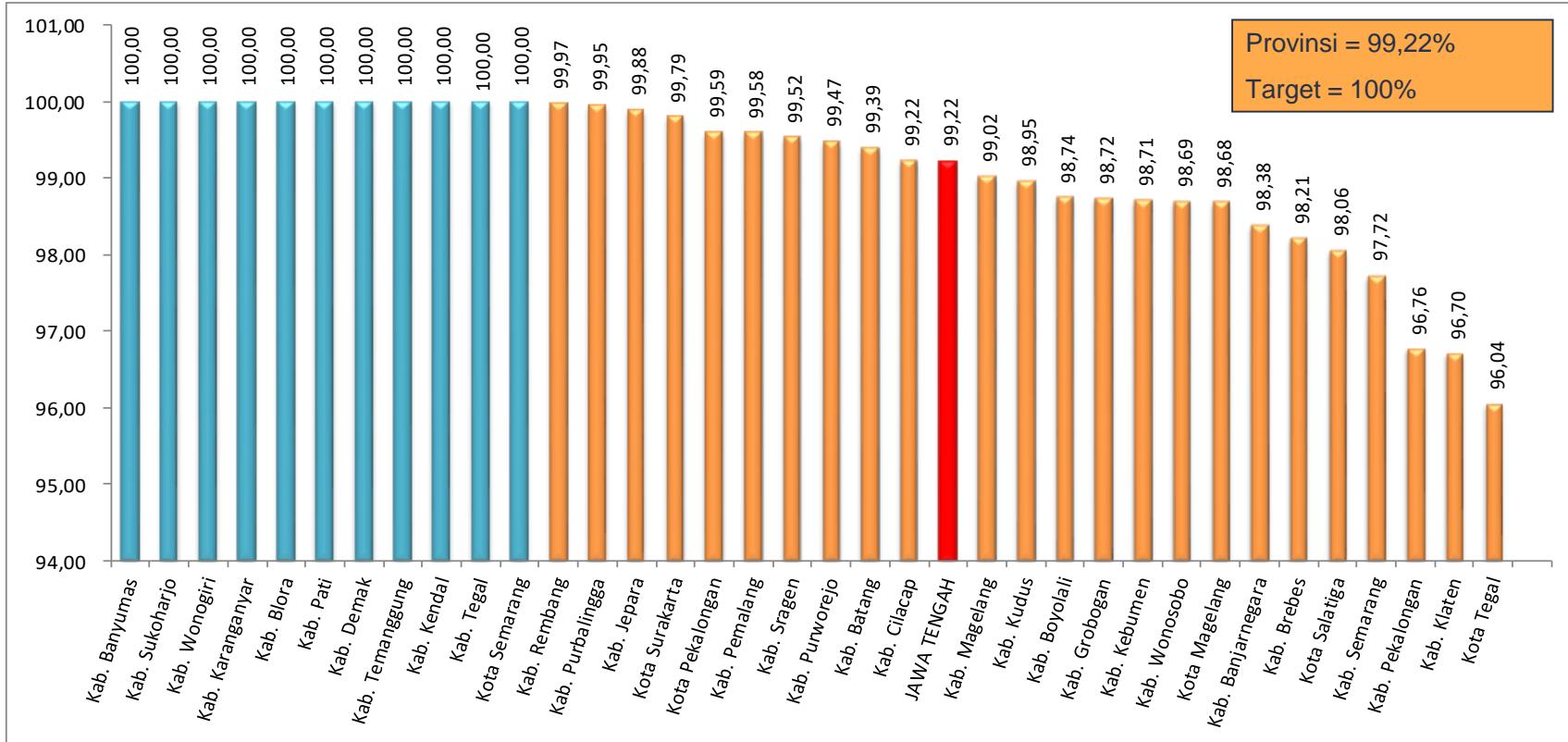


PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

Provinsi = 99,22%
Target = 100%



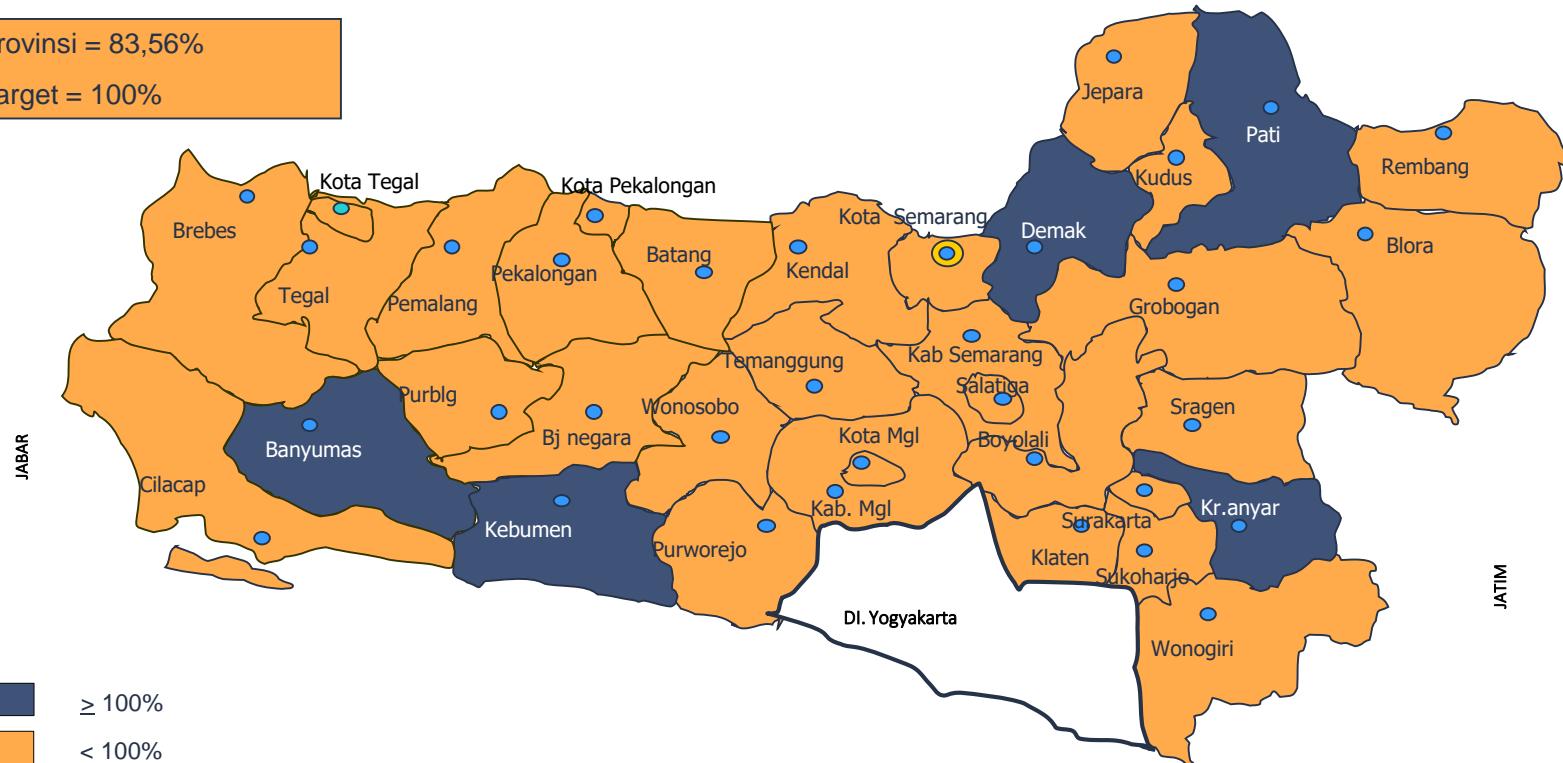
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR



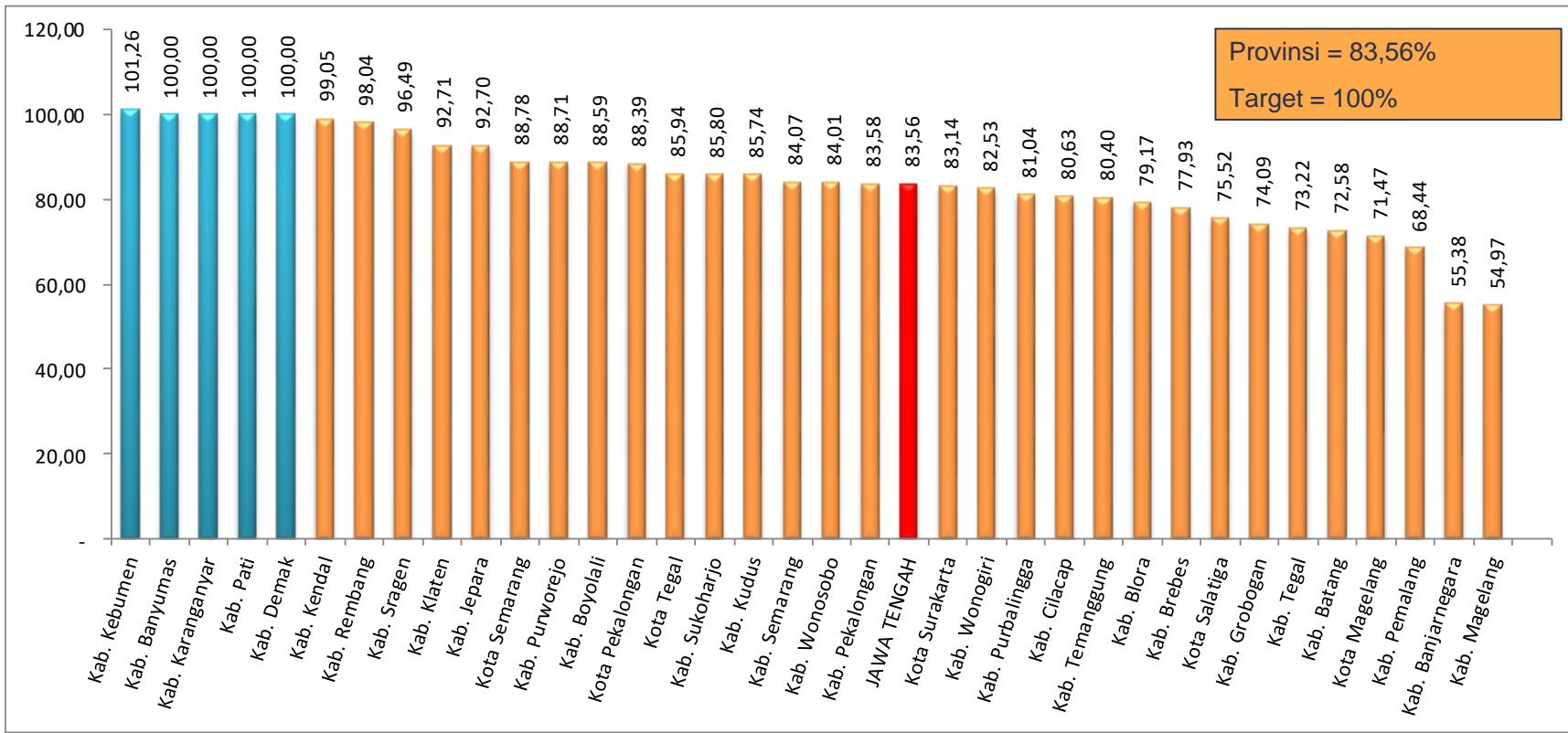
PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Provinsi = 83,56%

Target = 100%

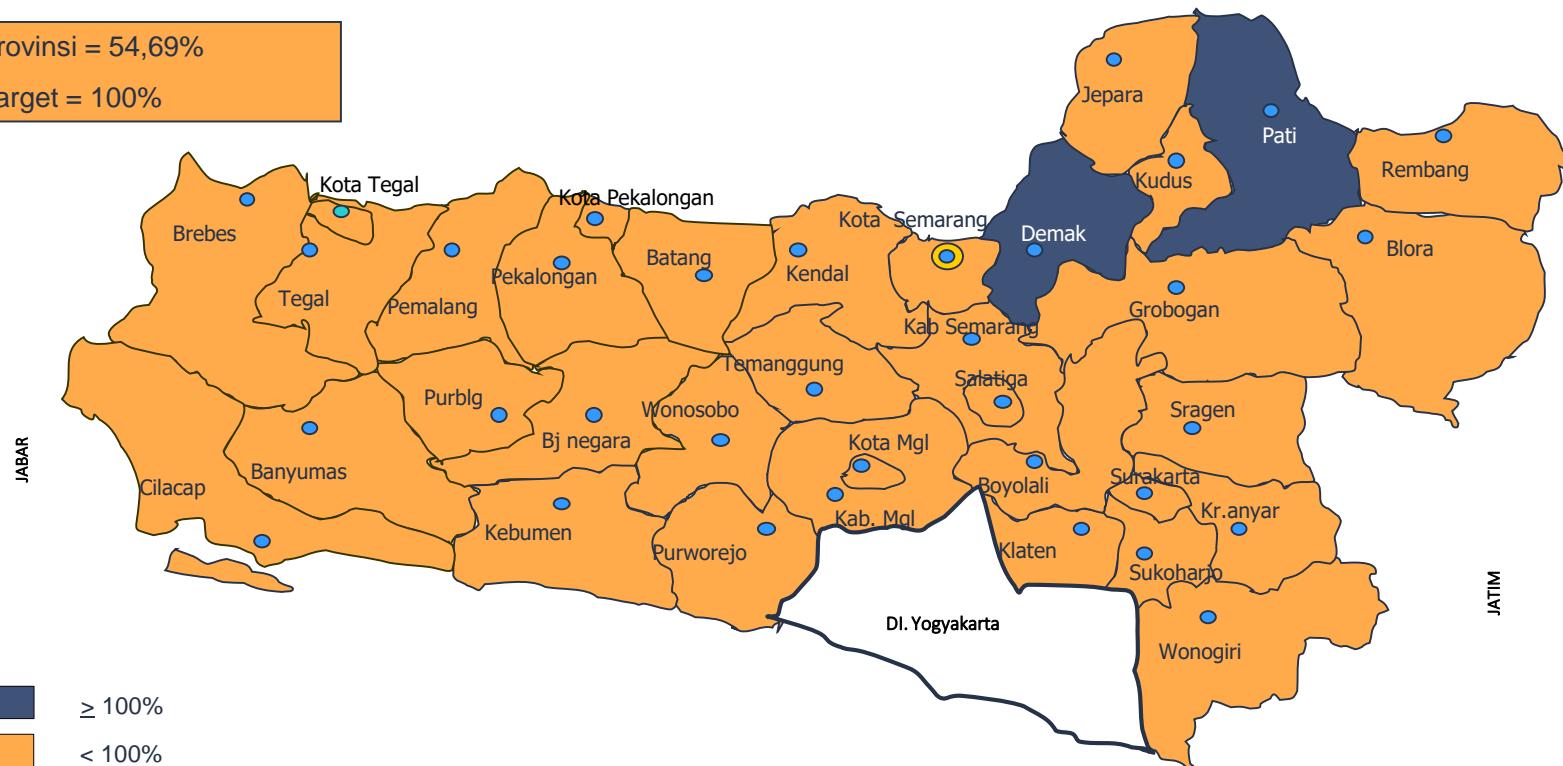


PELAYANAN KESEHATAN BALITA

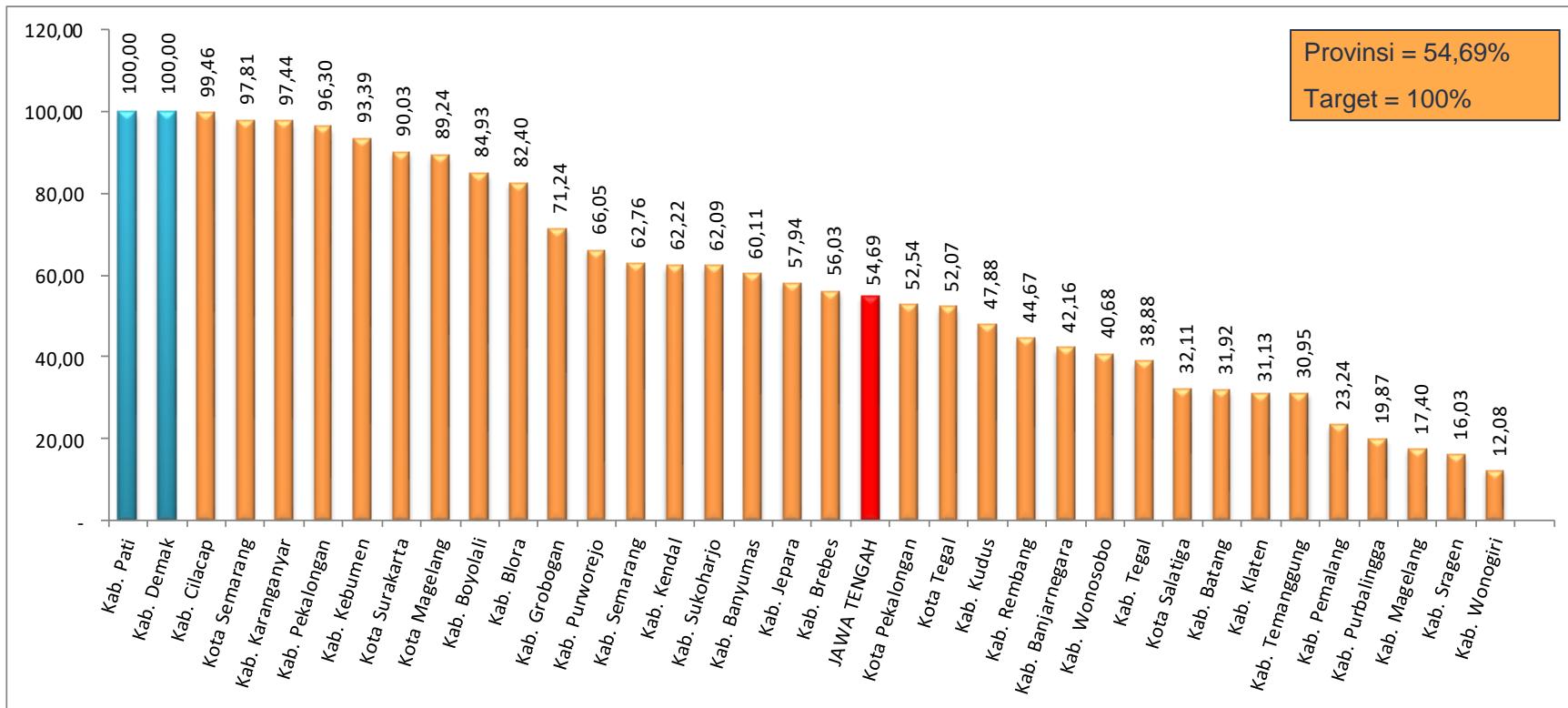


PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

Provinsi = 54,69%
Target = 100%



PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

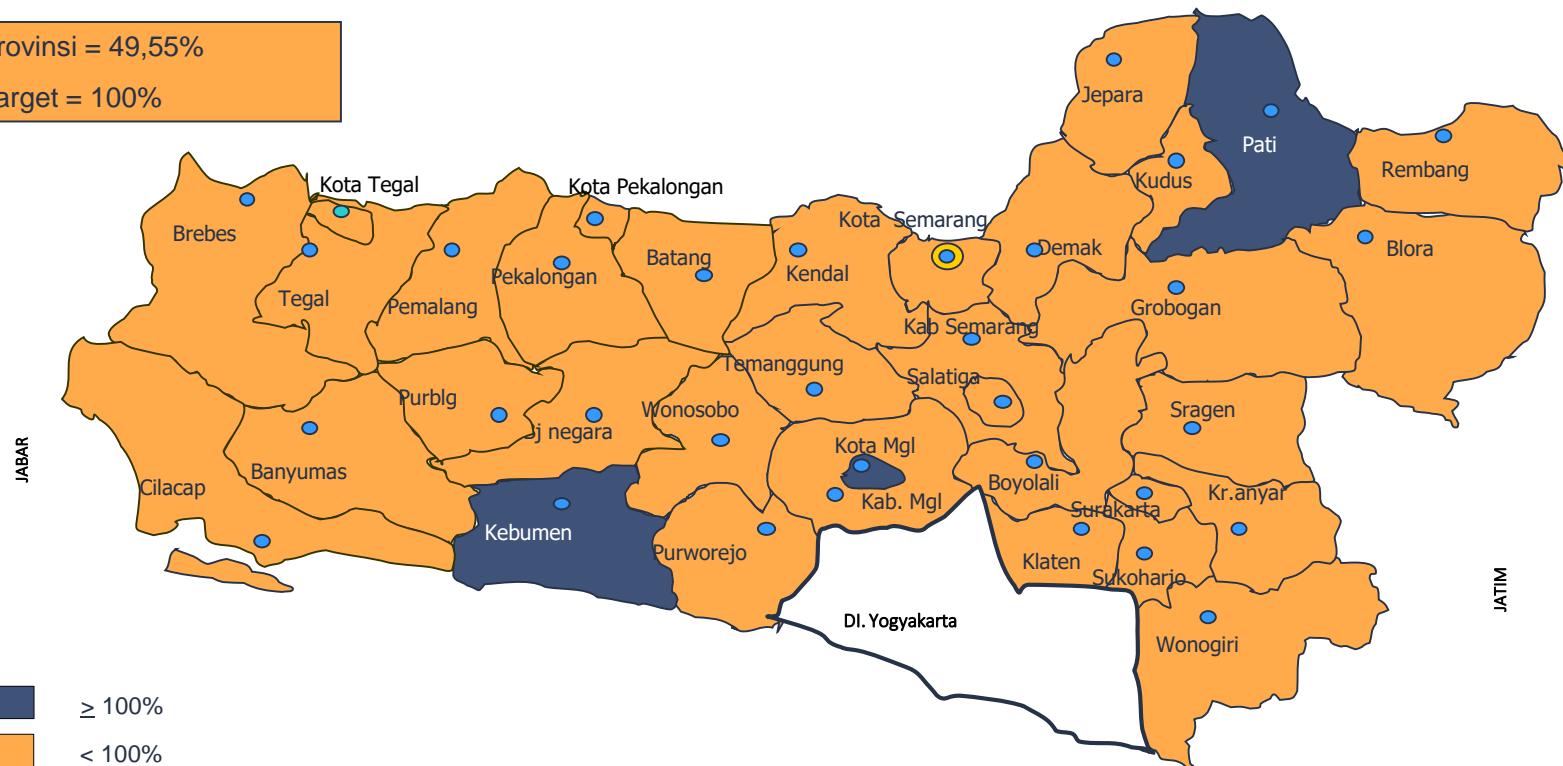


Provinsi = 54,69%

Target = 100%

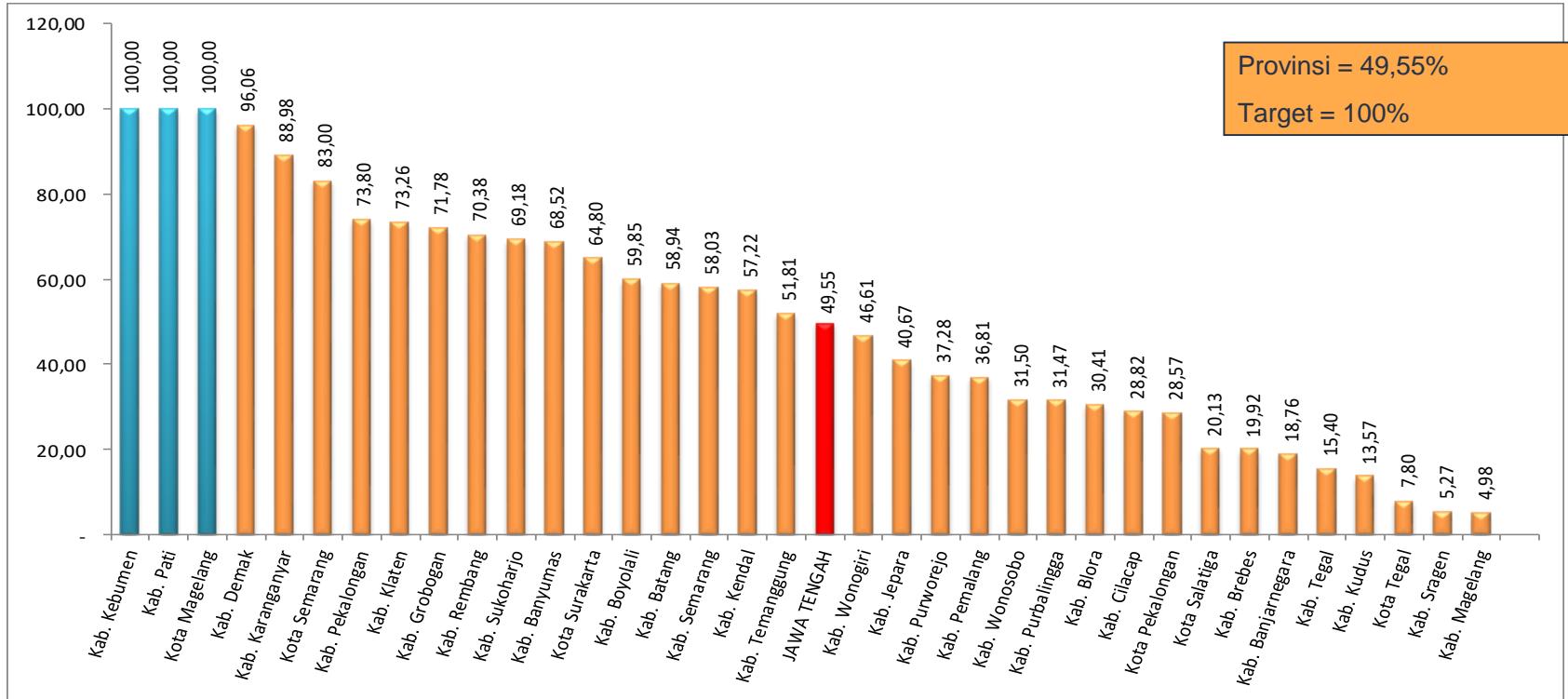
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

Provinsi = 49,55%
Target = 100%



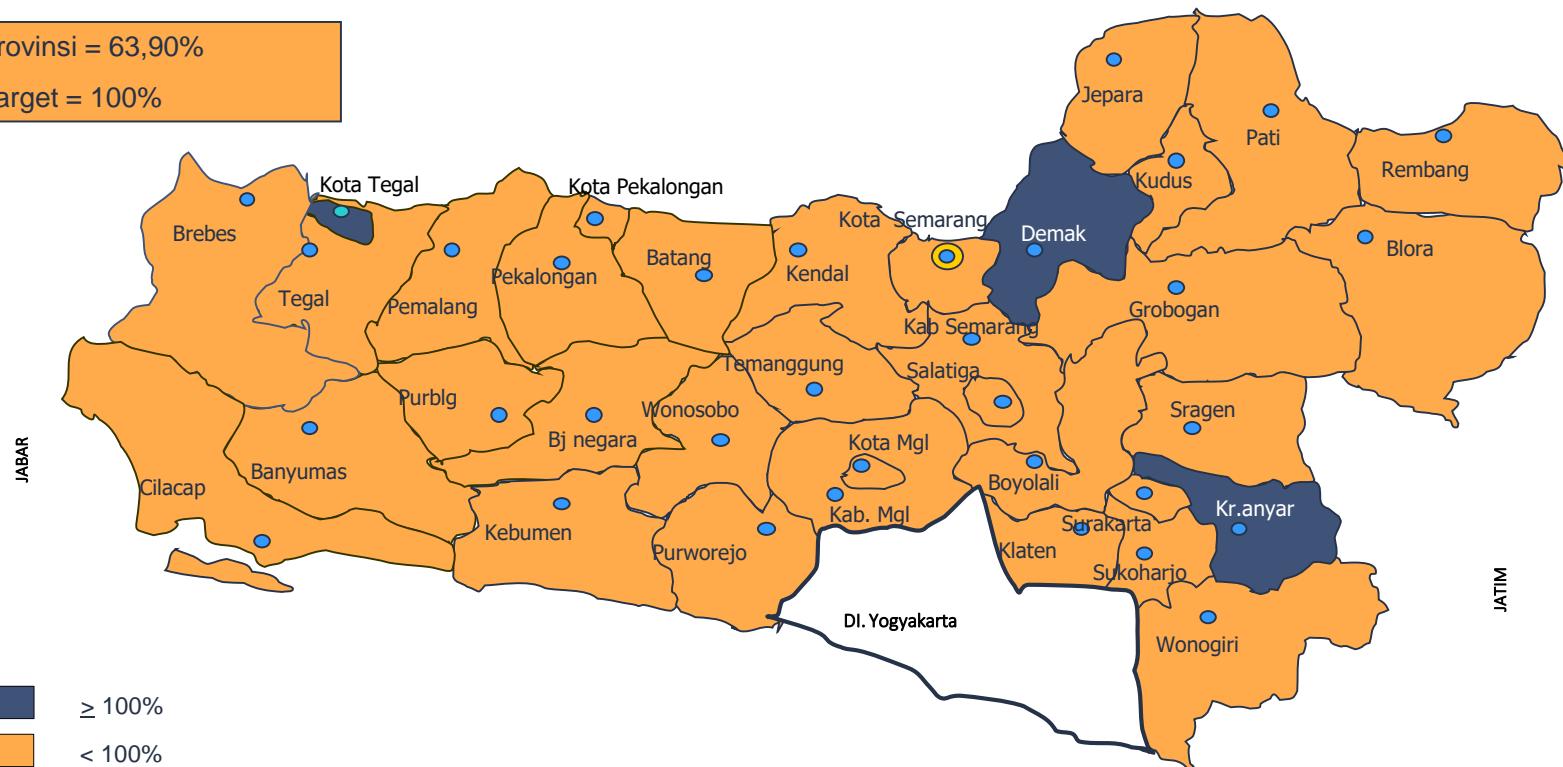
≥ 100%
< 100%

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF



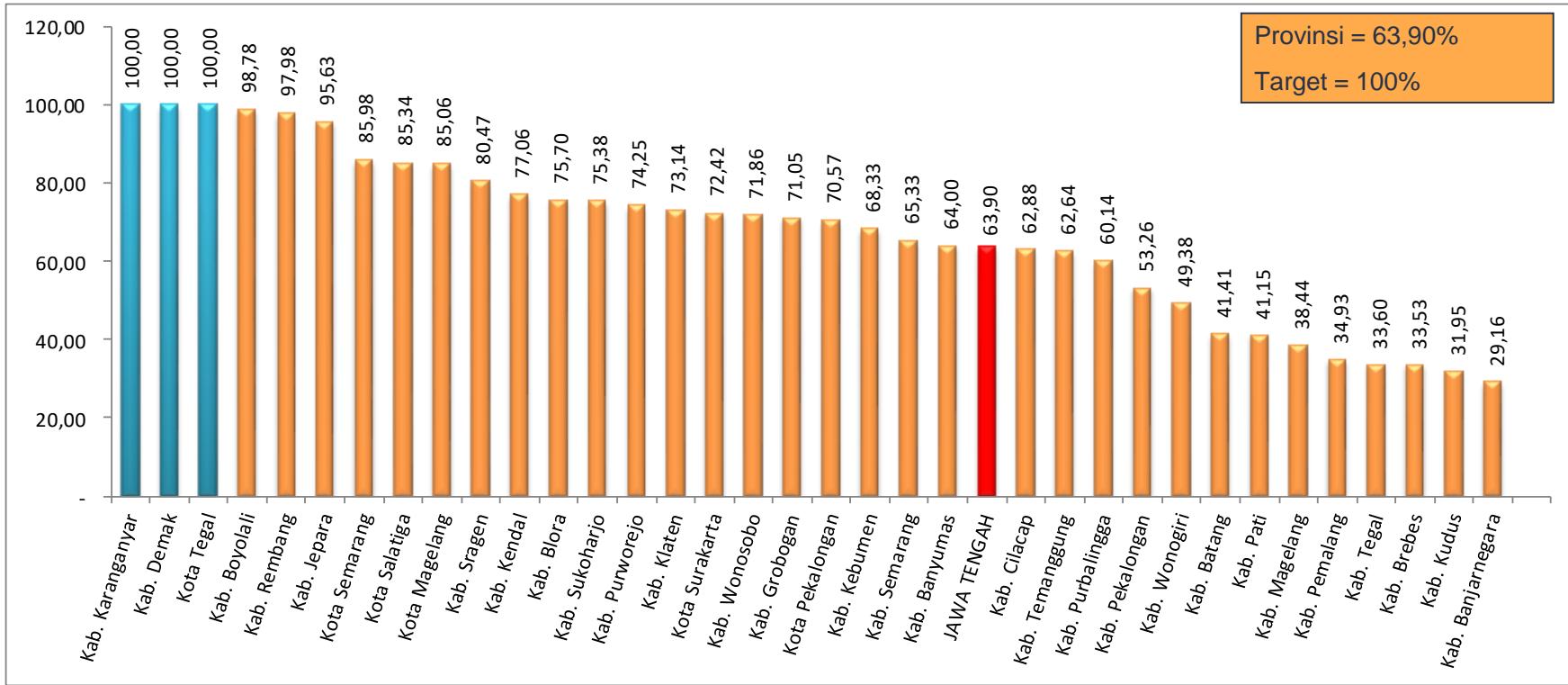
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

Provinsi = 63,90%
Target = 100%



≥ 100%
< 100%

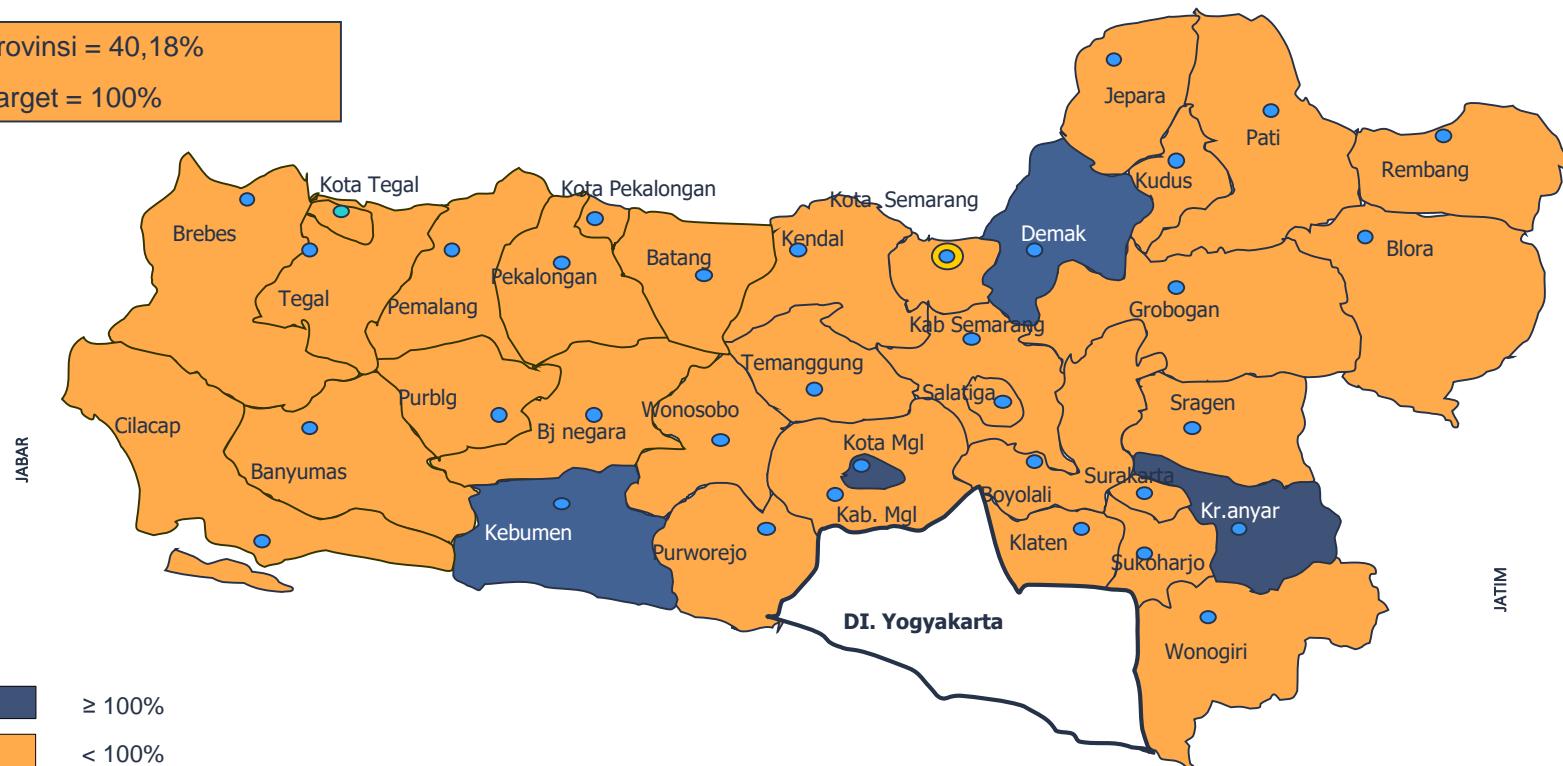
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT



Provinsi = 63,90%
Target = 100%

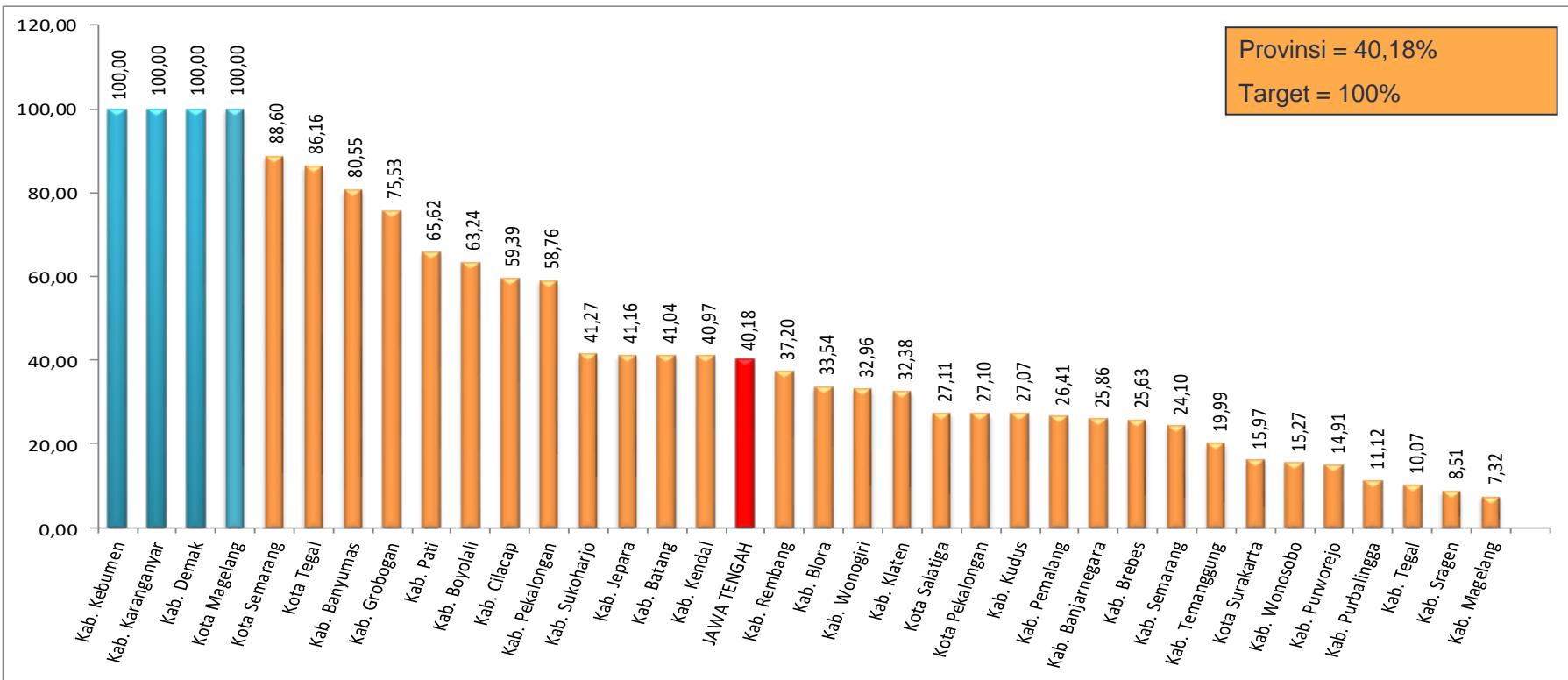
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

Provinsi = 40,18%
Target = 100%



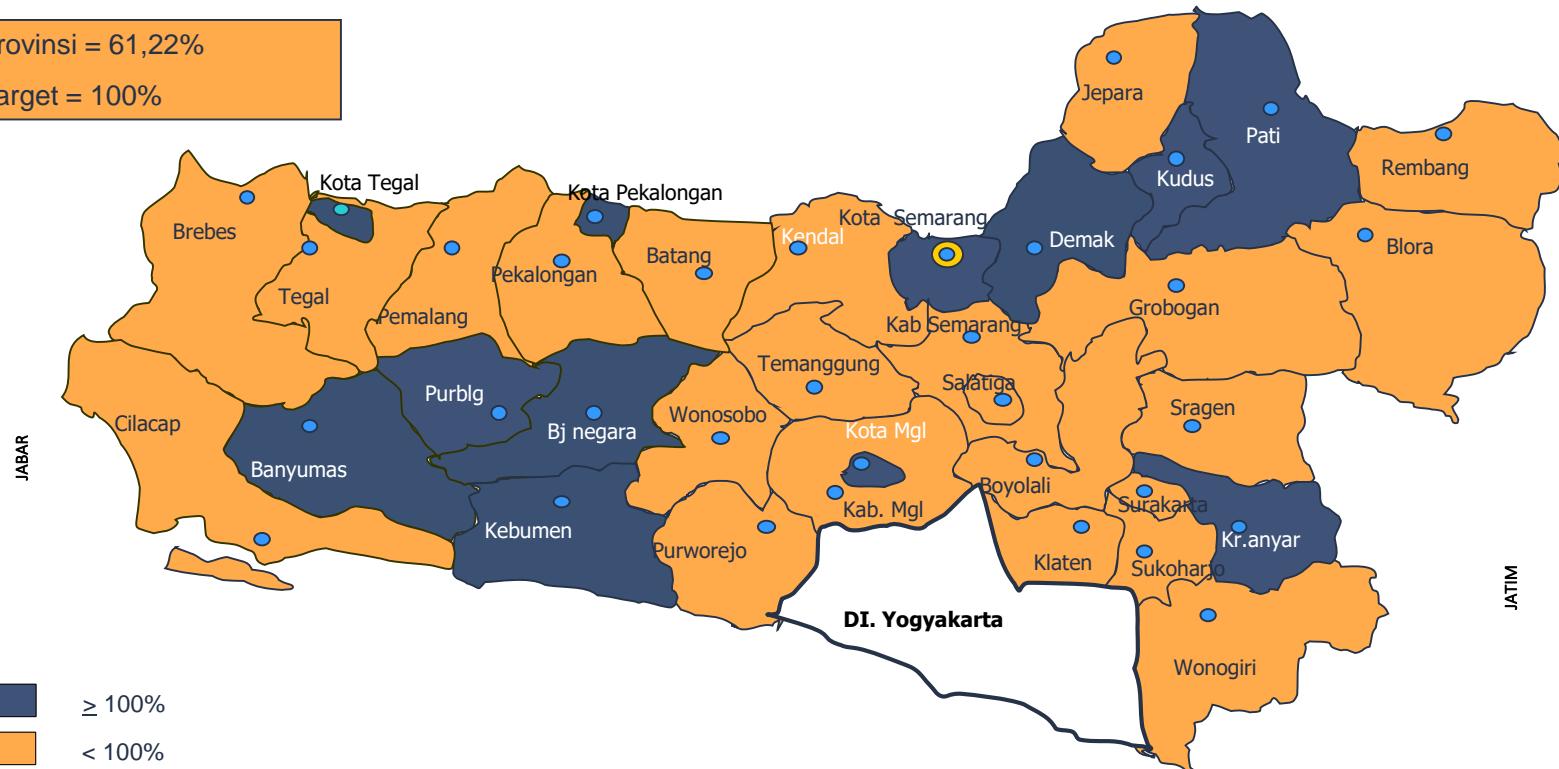
■ ≥ 100%
■ < 100%

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

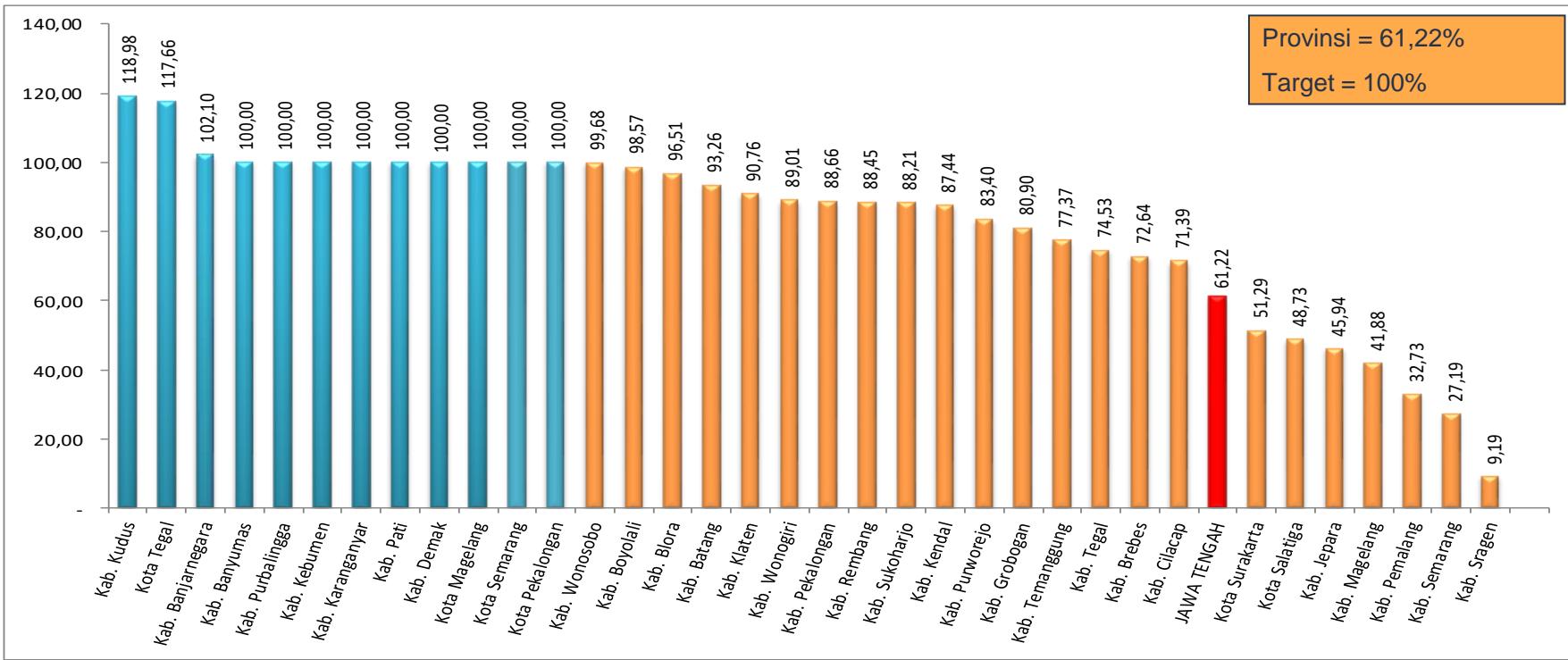


PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS

Provinsi = 61,22%
Target = 100%

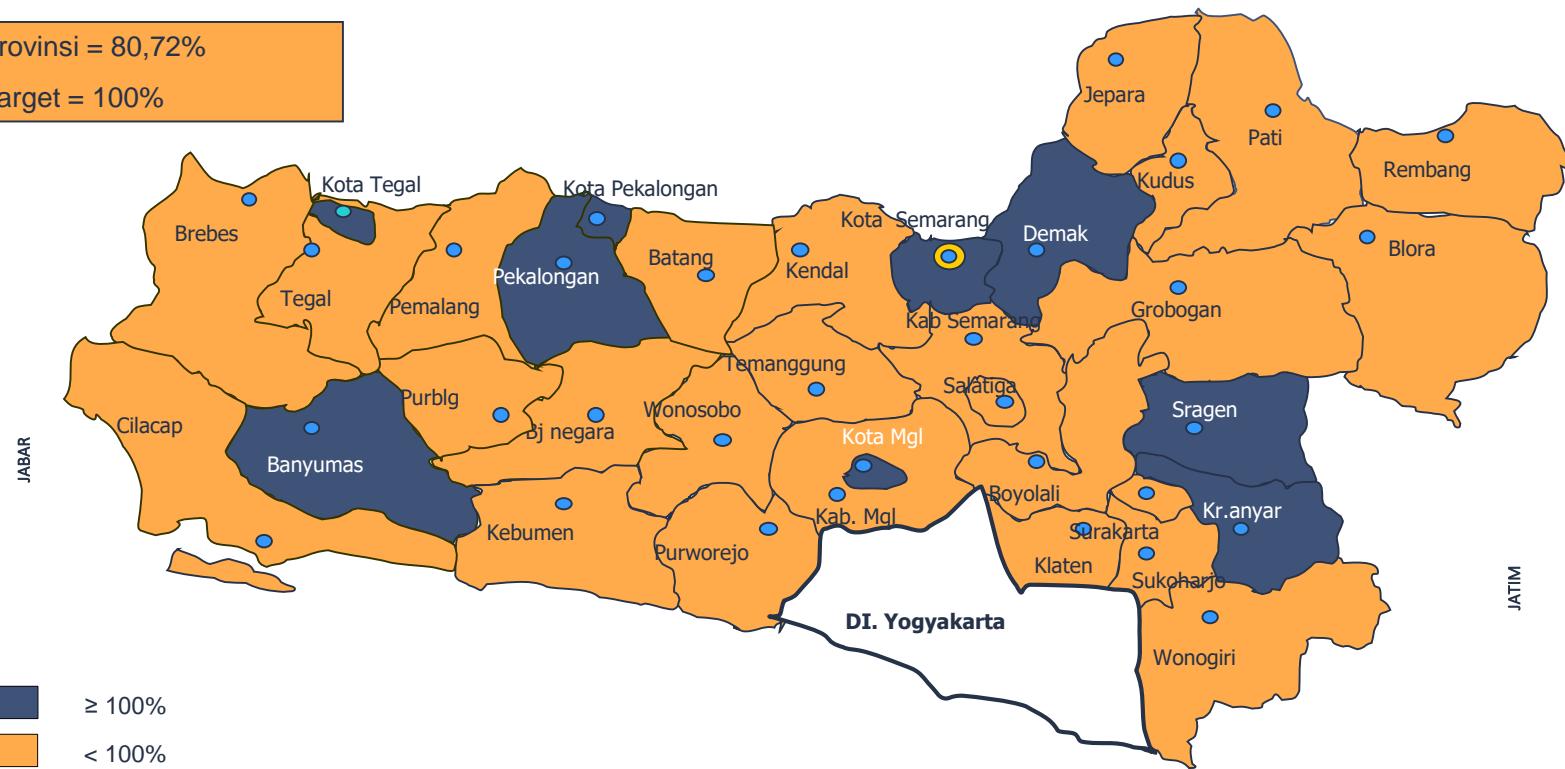


PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS

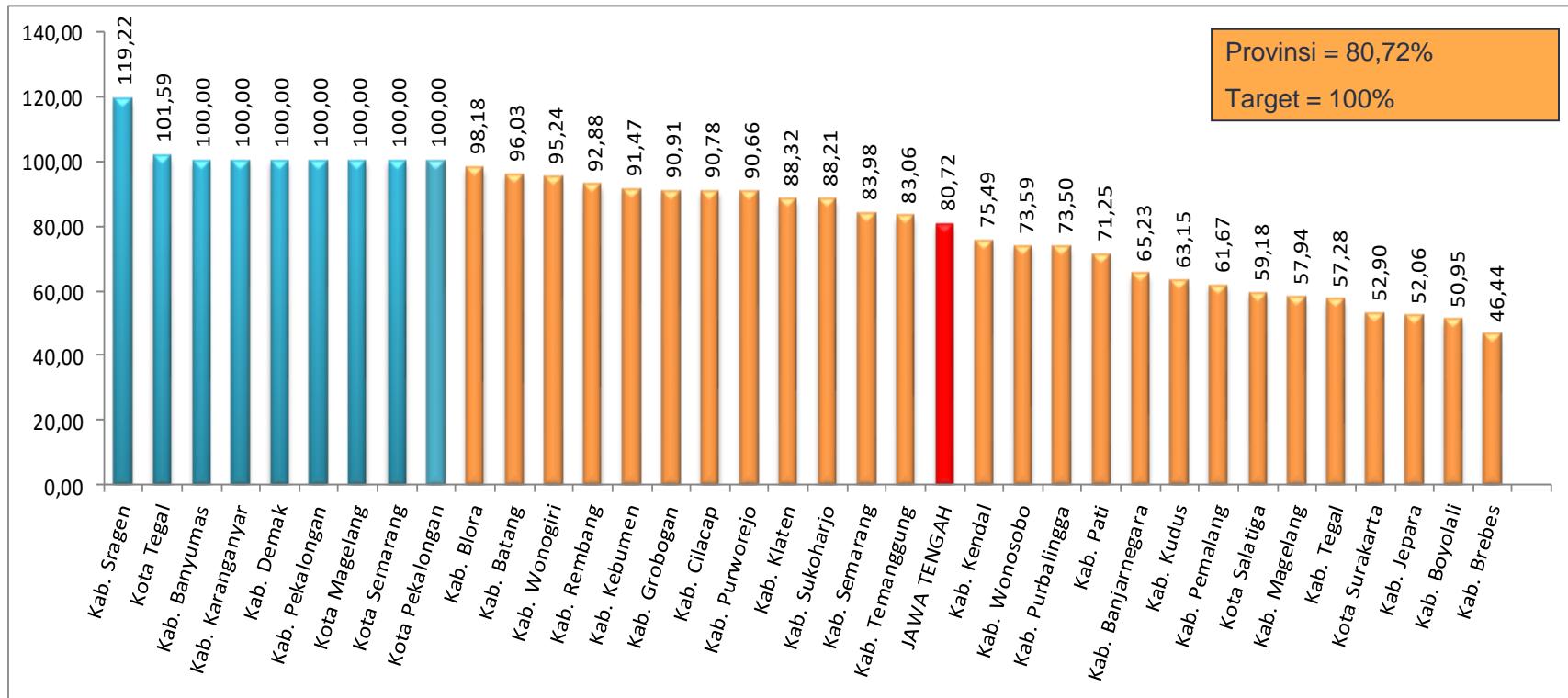


PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT

Provinsi = 80,72%
Target = 100%

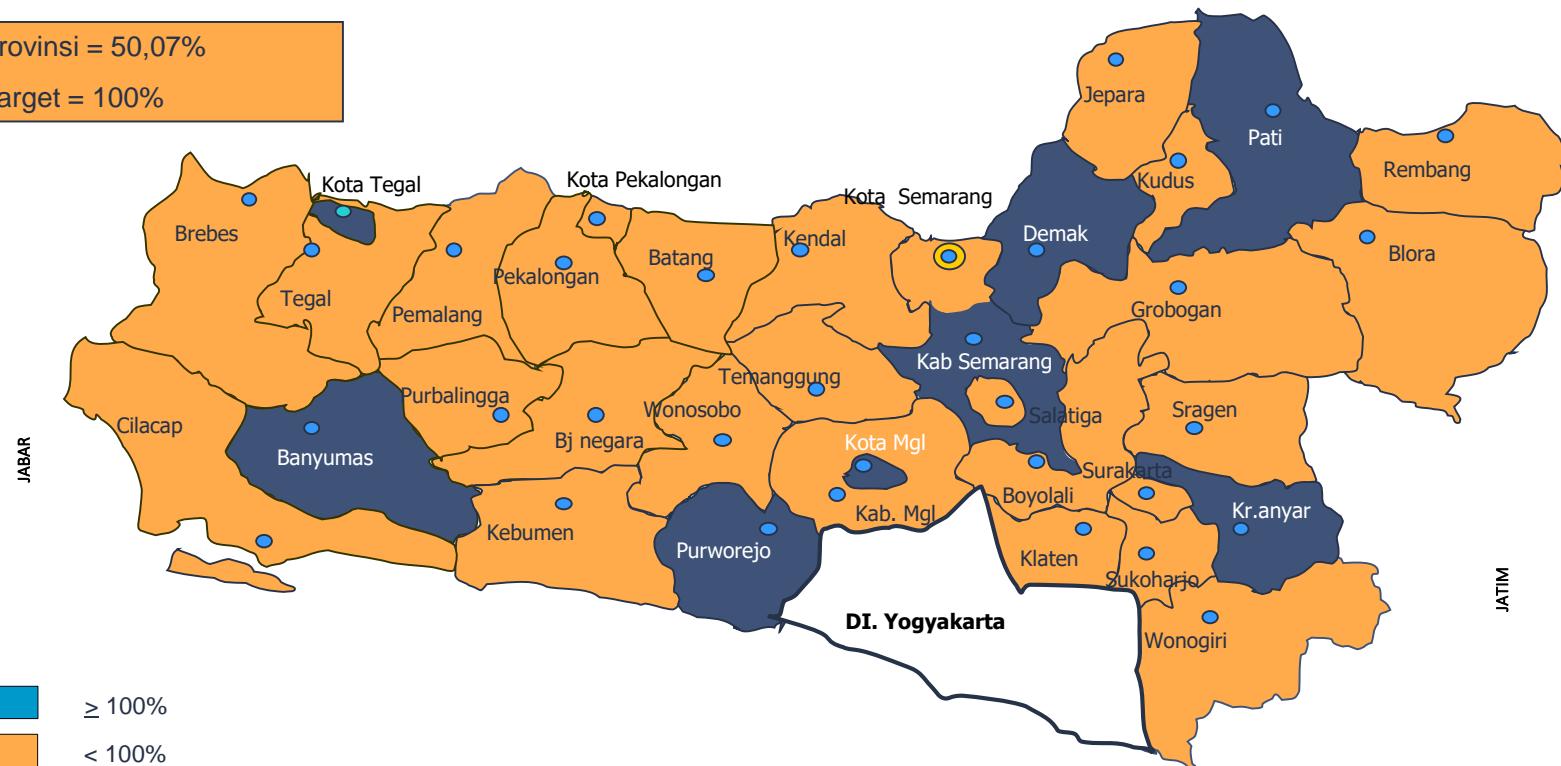


PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT

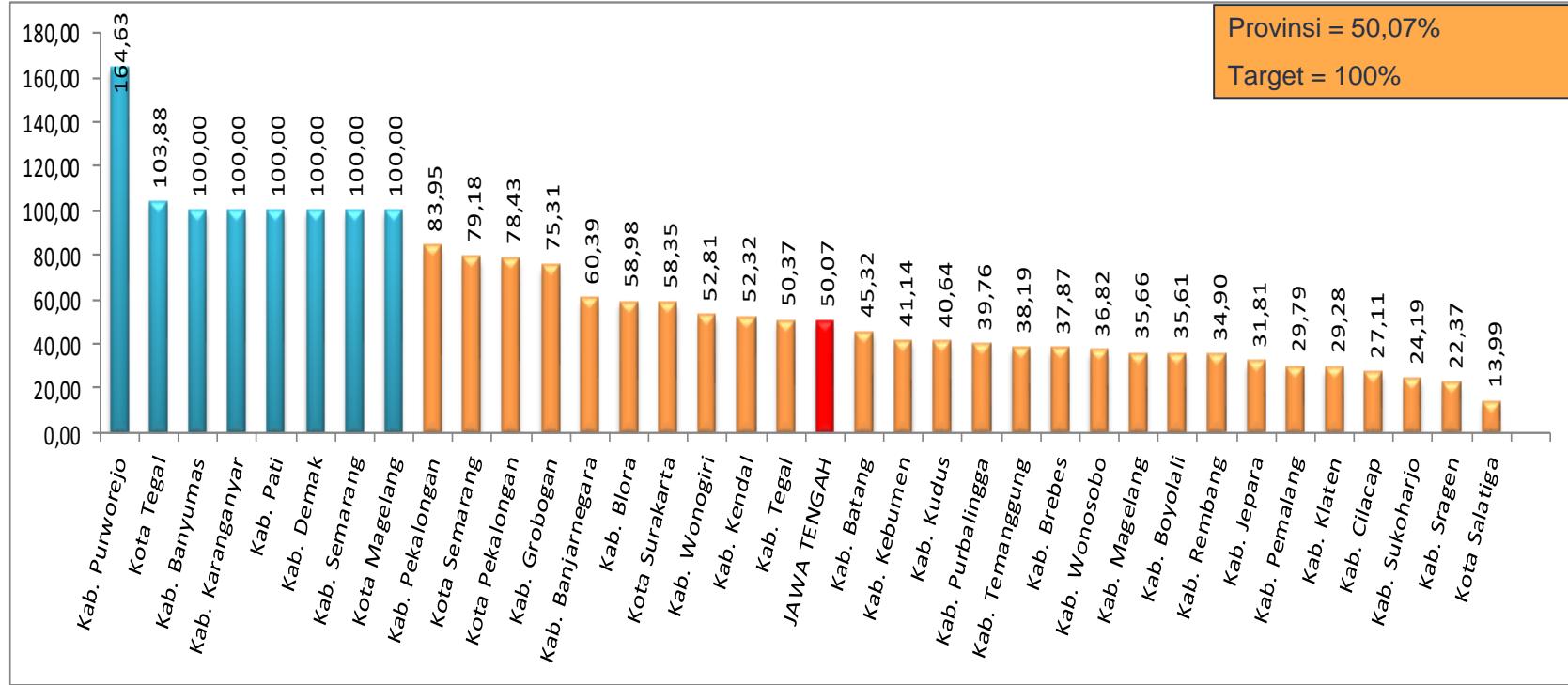


PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TB)

Provinsi = 50,07%
Target = 100%

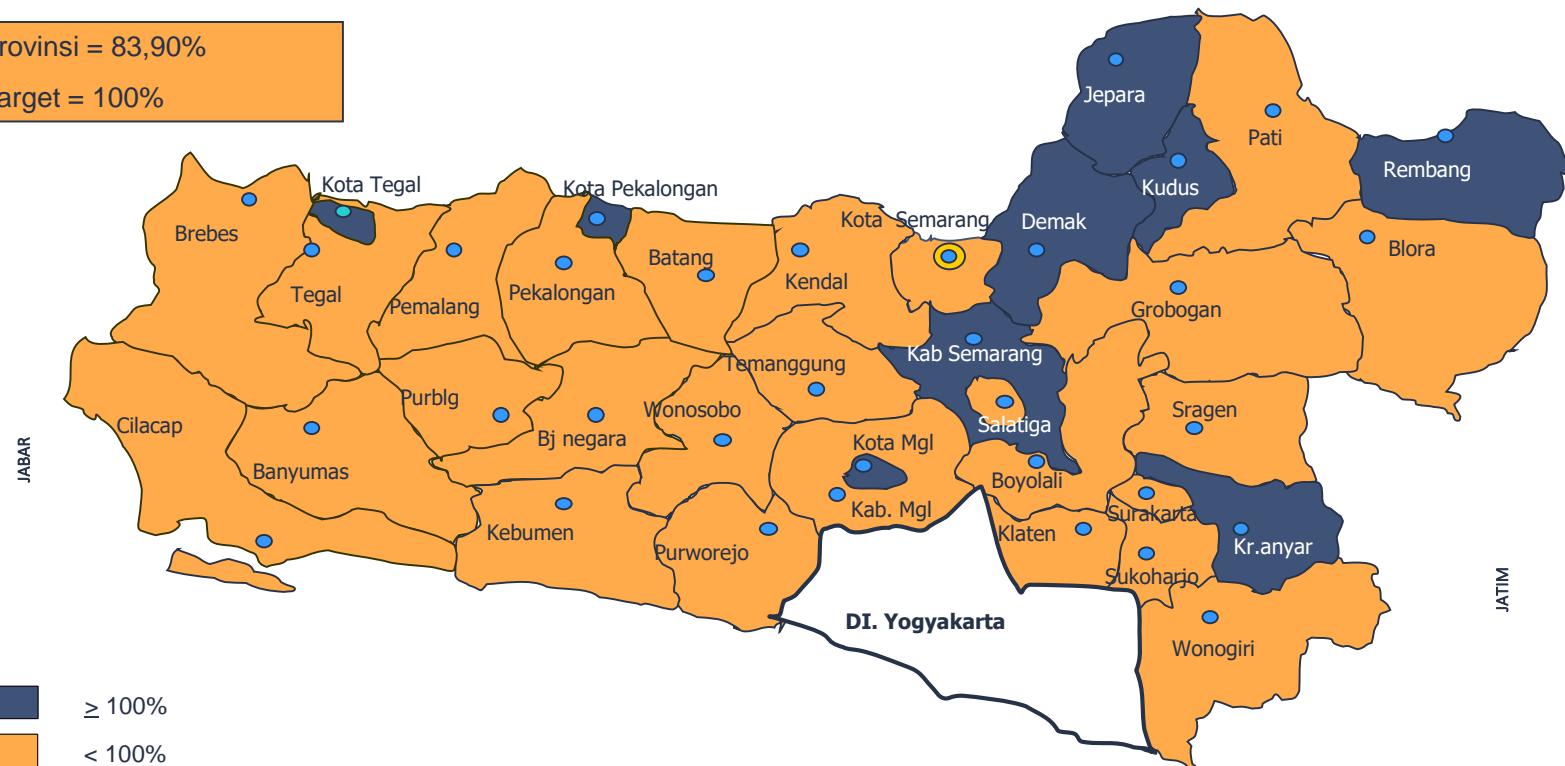


PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TB)

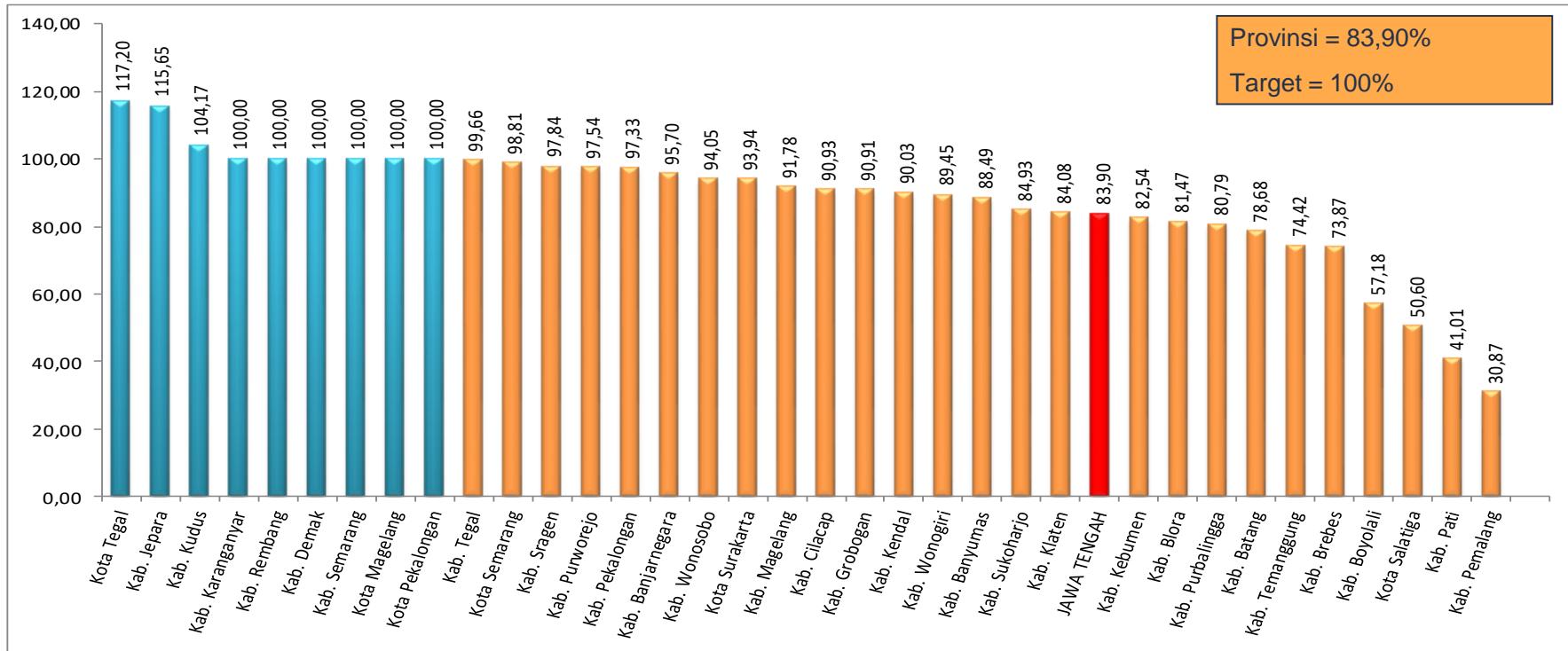


PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV

Provinsi = 83,90%
Target = 100%



PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL



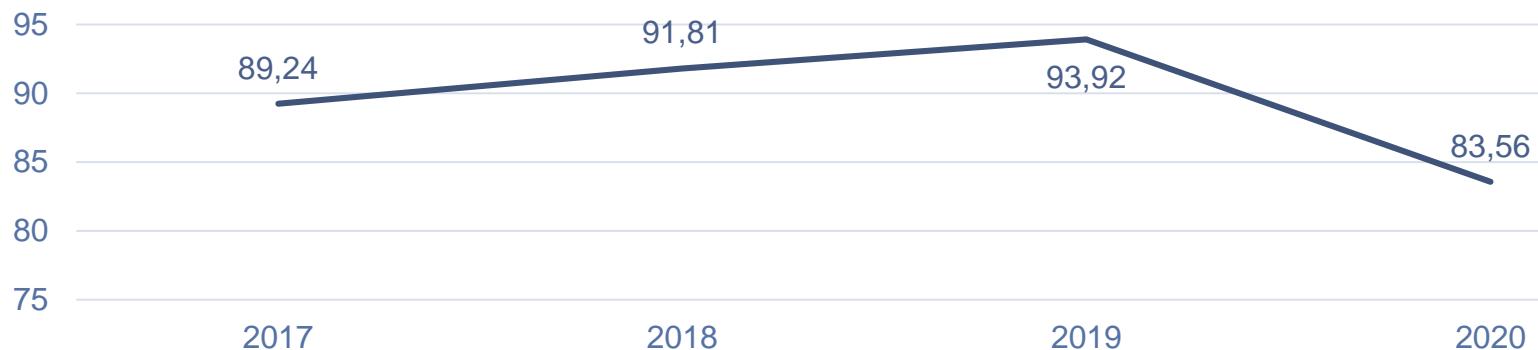
TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA HIPERTENSI



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TB



TREN CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV



PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN KAB/KOTA TAHUN 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang mencapai target	Percentase (%)
1	Kab. Demak	11	91,67
2	Kab. Karanganyar	10	83,33
3	Kab. Pati	8	66,67
4	Kab. Banyumas	7	58,33
5	Kota Magelang	7	58,33
6	Kota Semarang	5	41,67
7	Kota Tegal	5	41,67
8	Kab. Kebumen	4	33,33
9	Kab. Kudus	4	33,33
10	Kota Pekalongan	4	33,33
11	Kab. Wonogiri	3	25,00
12	Kab. Blora	3	25,00

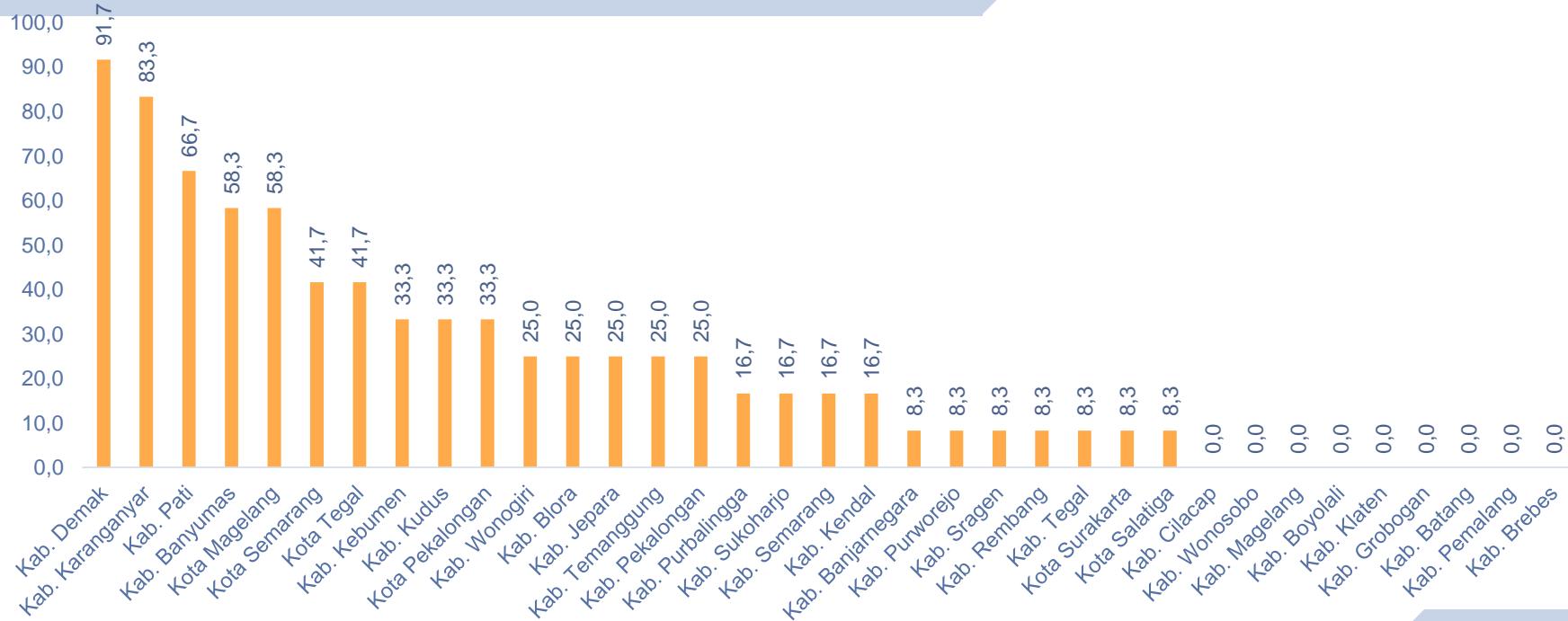
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN KAB/KOTA TAHUN 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang mencapai target	Persentase (%)
13	Kab. Jepara	3	25,00
14	Kab. Temanggung	3	25,00
15	Kab. Pekalongan	3	25,00
16	Kab. Purbalingga	2	16,67
17	Kab. Sukoharjo	2	16,67
18	Kab. Semarang	2	16,67
19	Kab. Kendal	2	16,67
20	Kab. Banjarnegara	1	8,33
21	Kab. Purworejo	1	8,33
22	Kab. Sragen	1	8,33
23	Kab. Rembang	1	8,33
24	Kab. Tegal	1	8,33

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN KAB/KOTA TAHUN 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang mencapai target	Percentase (%)
25	Kota Surakarta	1	8,33
26	Kota Salatiga	1	8,33
27	Kab. Cilacap	0	0,00
28	Kab. Wonosobo	0	0,00
29	Kab. Magelang	0	0,00
30	Kab. Boyolali	0	0,00
31	Kab. Klaten	0	0,00
32	Kab. Grobogan	0	0,00
33	Kab. Batang	0	0,00
34	Kab. Pemalang	0	0,00
35	Kab. Brebes	0	0,00

PERSENTASE JENIS PELAYANAN KESEHATAN SPM-BK KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI TARGET



PERSENTASE KAB/KOTA MENCAPAI TARGET PER JENIS PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kab./Kota Mencapai Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16 Kab./Kota (45,71%)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13 Kab./Kota (37,14%)
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12 Kab./Kota (34,29%)
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11 Kab./Kota (31,43%)
5	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	9 Kab./Kota (25,71%)
6	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	9 Kab./Kota (25,71%)
7	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga TB	8 Kab./Kota (22,86%)
8	Pelayanan Kesehatan Balita	5 Kab./Kota (14,29%)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4 Kab./Kota (11,43%)
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	3 Kab./Kota (8,57%)
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3 Kab./Kota (8,57%)
12	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	2 Kab./Kota (5,71%)

PERMASALAHAN

- Data sasaran SPM Kab/Kota belum ditetapkan oleh Kepala Daerah
- Pengalihan anggaran (Refocusing) berdampak pada capaian target SPM
- Terdapat 9 Kab/kota belum melakukan penghitungan pembiayaan SPM disebabkan perencanaan anggaran belum didasarkan pada costing SPM
- Terdapat deviasi capaian kinerja yang tinggi antara lain :
 - Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar tertinggi 100% dan terendah 12,08%,
 - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif tertinggi 100% dan terendah 4,98%,
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tertinggi 100% dan terendah 7,32%,
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus tertinggi 100% dan terendah 9,19%

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- Sasaran ditetapkan di awal tahun dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Penyusunan perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi Kejadian Luar Biasa /Bencana kesehatan
- Penyusunan anggaran berdasarkan costing SPM
- Meminimalkan deviasi capaian kinerja SPM antara lain dengan :
 - Menyamakan persepsi tentang definisi operasional indikator SPM
 - Melakukan verifikasi dan validasi data SPM secara berkala



DEFINISI OPERASIONAL

SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI



Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.



DEFINISI OPERASIONAL

SPM BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN/KOTA



Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga TBC	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

SUMBER DATA

Laporan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 Yang Dilaporkan Melalui Aplikasi Komunikasi Data (www.komdat.kemkes.go.id:8080).

TIM PENYUSUN

Pembina
Penanggung Jawab
Pengarah

: dr. Yulianto Prabowo, MKes
: Riptieni Tri Lutiarsi, SKM, MKes
: Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT
di Lingkungan Dinkes Provinsi Jateng

Ketua : Mufti Agung Wibowo, SKom, MIT
Kontributor Data :

1. Kepala Subag dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinkes Provinsi Jateng dan UPT Dinkes Provinsi Jateng
2. Pengelola Program Kesehatan di lingkungan Dinkes Provinsi Jateng dan UPT Dinkes Provinsi Jateng
3. Pengelola data seksi Manajemen Informasi Kesehatan:
 - a. Estri Aurorina, SKM, MKes
 - b. Aris Sugiharto, SKM, MKes (epid)
 - c. Masfiah, SKM, MKes
 - d. Endah Sri Lestari, SKM, MKes
 - e. Laila Erni Yusnita, SKM, MKes
 - f. Farida Hastuti, SKM, MKM
 - g. Istirochah, SKM, MKes
 - h. Winarni Retno Suciati, Amd
 - i. Dwi Julianto

CONTINUUM OF CARE

